

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Konsep Pengembangan Kapasitas dalam Kerangka Pemberdayaan Masyarakat.

2.1.1.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang mengalami kondisi kemiskinan, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Keterbelakangan yaitu upaya untuk membantun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi sebuah tindakan nyata. (Eddy, 2001 : hlm 1 dalam Zubaedi, 2013 : hlm 21).

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya membangun kemampuan masyarakat dan memberdayakan sumber daya manusia (SDM) yang ada melalui pengembangan kelembagaan, sarana dan prasarana serta pengembangan tiga-p (Pendampingan, penyuluhan dan pelayanan). Pendampingan yang dapat menggerakkan partisipasi total masyarakat, penyuluhan dapat merespon dan memantau ubahan-ubahan yang terjadi di masyarakat, dan pelayanan yang berfungsi sebagai unsur penggal ketepatan distribusi aset sumber daya fisik dan non fisik yang diperlukan masyarakat. (Vitalaya 2000, dalam Zubaedi, 2013 : hlm 61).

Menurut Suharto (2017 : hlm 218-219) Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu: Pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan:

- 1) Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat

- 2) Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- 3) Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- 4) Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan atau posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- 5) Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Menurut Kartasmita (1996 : hlm 159-160) dalam Mulyawan (2016 : hlm 62) menyebutkan tiga aspek pokok yang terlalu dilakukan dalam proses pemberdayaan masyarakat yaitu :

- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya karena, kalau demikian akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat melalui pemberian masukan berupa bantuan dana, pembangunan prasarana, pengembangan lembaga pendanaan, penelitian dan pemasaran serta pembukaan akses berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.
- 3) Melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang. Pemberdayaan masyarakat tidak membuat masyarakat bergantung pada berbagai program pemberian, karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri.

Pemberdayaan dalam konteks masyarakat merupakan kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun pemberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Menurut Ife dalam Atshil (2017 : hlm 44) Pemberdayaan masyarakat adalah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depanyasendiri dan berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dari msyarakat. Pemberdayaan masyarakat berorientasi kepada kesejahteraan, apabila dirancang dan dilaksanakan dengan fokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka kesejahteraan pun akan tercapai. Pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam penelitian ini yaitu melalui program ekonomi kreatif masyarakat dalam home industry.

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat yaitu untuk memberdayakan masyarakat yang tidak berdaya agar menjadi masyarakat yang berdaya. Artinya untuk memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya bagi kelompok lemah yang tidak memiliki keberdayaan, baik karena kondisi internal maupun karena kondisi eksternal. Menurut Agustin (2019 : hlm 20) pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka tidak menggantungkan diri dan bisa memiliki kekuatan atau kemampuan dalam hal sebagai berikut :

Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan. Tidak hanya bebas dalam mengemukakan pendapat melainkan bebas dari segalahnya seperti kelaparan, kebodohan dan bebas dari kesakitan. Menjangkau sumber-sumber produktif yang mungkin dapat meningkatkan pendapatan sehingga dapat

memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang dapat mempengaruhi mereka.

Pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh BUMDes terhadap home industry dalam memberdayakan masyarakat yaitu pengembangan kapaistas dalam segi pemasaran. Karena pemasaran yang dilakukan oleh home industry hanya daerah ciamis saja belum antar kota. Sedangkan pemasaran yang dilakukan oleh home industry yaitu pemasaran antar kota.

2.1.1.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sulistiyani (2017 : hlm 80) tujuan yang dicapai dari pemberdayaan yaitu untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Pemberdayaan masyarakat hendaklah mengarah pada pembentukan kongnitif, kondisi kongnitif pada hakekatnya kemamuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.

Tujuan dari pemberdayaan berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa

“Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan ke swadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik”.

Sedangkan menurut Suharto (2017 : hlm 60) mengatan bahwa tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat masyarakat yang lemah tidak memiliki ketidakberdayaan baik karena masalah internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena masalah eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).

Menurut Theresia (2015 : hlm 153) tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan diantaranya:

- 1) Perbaikan kelembagaan (*better institution*) dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan termasuk kelembagaan jejaring kemitraan usaha
- 2) Perbaikan usaha (*better business*), perbaikan pendidikan atau semangat belajar, perbaikan aksesibilitas kegiatan, perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan
- 3) Perbaikan pendapatan (*better income*) dengan terjadi perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki dari segi pendapatan yang diperoleh termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat
- 4) Perbaikan lingkungan (*better improvement*) perbaikan pendapatan bisa langsung berdampak pada segi lingkungan yang ditempati baik fisik maupun sosial. Karena kerusakan lingkungan seringkali di sebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
- 5) Perbaikan kehidupan (*better living*) tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat
- 6) Perbaikan masyarakat (*better community*) keadaan kehidupan yang lebih baik yang didukung lingkungan fisik maupun sosial yang baik pula diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

2.1.1.3 Tahapan-Tahapan Pemberdayaan

Menurut Khan (1997) dalam Bakri (2017) pemberdayaan dapat dikembangkan dalam sebuah organisasi untuk menjamin keberhasilan proses pemberdayaan masyarakat yang di gambarkan dalam sebuah model empowerment. Model-model dan tahapan-tahapan dalam pemberdayaan itu sebagai berikut:

1) *Desire*

Pemberdayaan tahapan pertama adalah *desire* (pendelegasian) adalah adanya pendelegasian dari pihak manajemen dalam hal ini pemerintah untuk mendelegasikan dan melibatkan masyarakat.

2) *Trust*

Tahap *trust* (membangun kepercayaan) yaitu dimana adanya keinginan dari manajemen dalam hal ini pemerintah untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat.

3) *Confident*

Tahap ketiga adalah saling percaya yaitu dimana adanya tindakan yang dapat menimbulkan rasa percaya diantara pemerintah dan masyarakat dengan menghargai terhadap kemampuan yang dimiliki masyarakat.

4) *Credibility*

Tahap keempat yaitu adanya keinginan dari pihak manajemen dalam hal ini pemerintah untuk menjaga kredibilitas dengan cara pemberian penghargaan dan pengembangan masyarakat.

5) *Accountability*

Tahap ini merupakan tahap keinginan dari pihak manajemen dalam hal ini pemerintah untuk meminta pertanggung jawaban terhadap wewenang yang diberikan.

6) *Communication*

Tahapan terakhir yaitu kegiatan dari pihak manajemen dalam hal ini pemerintah untuk mengadakan komunikasi yang saling terbuka untuk menciptakan suatu keadaan yang saling memahami antara masyarakat dan pemerintah.

2.1.1.4 Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Parsons et.al. (1994 : hlm 112-113) dalam Suharto (2017 : hlm 66) menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perorangan. Beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual; meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem di luar dirinya. Konteks perjalanan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan

melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*): mikro, mezzo, dan makro.

- 1) Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu secara bimbingan, konseling, *stress management, crisis, intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered aproach*)
- 2) Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
- 3) Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan kepada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan soaial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem aras memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

2.1.1.5 Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Menurut beberapa penulis seperti Solomon (1976), Rappaport (1981, 1984), Pinderhughes (1983), Swift (1984), Swift dan Levin (1987), Weick, Rapp, Sullivan dan Kisthardt (1989) dalam Suharto (2017 : hlm 68), terdapat beberapa prinsip pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan sosial.

- 1) Pemberdayaan dalah proses kolaboratif. Karenanya pekerjaan soaial dan masyarakat harus bekerja sama sebagai patner.

- 2) Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan
- 3) Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan
- 4) Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat
- 5) Solusi-solusi, yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan mampu mengausai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut
- 6) Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang
- 7) Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri: tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri
- 8) Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan
- 9) Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif
- 10) Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif: permasalahan selalu memiliki beragam solusi
- 11) Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.

2.1.1.6 Proses Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mardikanto (2013 : hlm 125) proses pemberdayaan masyarakat terdiri dari:

- 1) Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta peluang-peluangnya. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisis kedadaannya, baik potensi ataupun permasalahannya. Pada tahap ini diharapkan dapat diperoleh gambaran

mengenai aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan. Proses ini meliputi persiapan masyarakat dan pemerintah sepemapat untuk melakukan pertemuan awal dan teknis pelaksanaannya, persiapan penyelenggaraan pertemuan, pelaksanaan kajian dan penilaian keadaan, dan pembahasan hasil serta penyusunan rencana tindak lanjut

2) Menyusun rencana kegiatan

Berdasarkan hasil kajian meliputi memprioritaskan dan menganalisis masalah-masalah, identifikasi alternatif pemecahan masalah yang terbaik. Identifikasi sumber masalah yang tersedia untuk pemecahan masalah, dan pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian pelaksanaannya.

3) Implementasi kegiatan

Rencana yang telah disusun bersama dengan dukungan fasilitasi dari pendampingan selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan dengan memperhatikan realisasi dan tujuan awal. Rangkaian kegiatan ini termasuk pelaksanaan pemantauan dan kemajuan kegiatan menjadi perhatian, selain itu perbaikan jika diperlukan.

4) Monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara mendalam pada tahapan pemberdayaan dengan tujuan agar prosesnya berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan. Kegiatan ini adalah proses penilaian, pengkajian dan pemantauan kegiatan baik prosesnya maupun hasil dan dampak agar dapat disusun proses perbaikan bila diperlukan.

2.1.2 Home Industry

2.1.2.1 Pengertian home industry

Home berarti rumah, tempat tinggal, ataupun kampung halaman. Sedangkan *industry*, dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang dan ataupun perusahaan. Siangkatnya home industri adalah rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil, (Susana, 2012 : hlm 25).

Home industry merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Pengolahan yang tepat pada sektor ini

dapat meningkatkan jumlah ekspor produk lokal, peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja serta dapat meningkatkan pendapatan petani lokal. (Nugroh, 2016 : hlm 1). *Home industry* merupakan semua kegiatan ekonomi berupa pengolahan barang yang nantinya memiliki nilai jual.

2.1.2.2 Jenis-jenis *Home Industry*

Sebelum memulai suatu usaha terlebih dahulu perlu yang namanya penentuan bidang apa yang ingin ditekuni. Pemilihan bidang usaha ini penting agar kita mampu mengelolanya. Pemilihan bidang ini harus disesuaikan dengan minat dan bakat seseorang karena minat dan bakat merupakan faktor penentu dalam menjalankan suatu usaha. (Maliha, 2018 : hlm 16)

1) Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja:

- a) Industri rumah tangga merupakan industri yang karyawan tenaganya berjumlah satu sampai empat orang.
- b) Industri kecil merupakan industri yang karyawan tenaganya berjumlah lima sampai dengan sembilan belas orang.
- c) Industri sedang atau industri menengah merupakan industri yang karyawan tenaganya berjumlah dua puluh sampai dengan sembilan puluh sembilan.

2) Berdasarkan Pemilihan Lokasi

- a) Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada pasar merupakan industri yang didirikan sesuai dengan lokasi potensi target konsumen.
- b) Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada tenaga kerja merupakan industri yang berada pada lokasi di pusat pemukiman penduduk karena biasanya jenis industri tersebut membutuhkan banyak pekerja untuk lebih efektif dan efisien.
- c) Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada bahan baku merupakan jenis industri yang mendekati lokasi dimana bahan baku berada untuk memangkas atau memotong biaya transportasi yang besar.

2.1.2.3 Landasan Hukum Usaha Kecil

Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pasal 7 dan 8 dalam Alfi (2016 : hlm 1) mengamanatkan bahwa pemerintah dalam

pemerintah daerah untuk menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek diantaranya terkait pendanaan. Usaha mikro berdasarkan undang-undang No. 20 tahun 2008 dalam Susanti(2017 : hlm 203) Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) merupakan usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

- a) Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung.
- b) Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak dari perusahaan atau cabang perusahaan yang dimilikinya.
- c) Usaha mikro merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan suatu pendapatan.

2.1.2.4 Kekuatan dan Kelemahan *Home industry*

Menurut Susana (2012 : hlm 32) *home industry* memiliki beberapa kekuatan potensi yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang yaitu:

- a) Menyediakan lapangan kerja, peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia.
- b) Sumber wirausaha baru, keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru.
- c) Memiliki segmen usaha pasar yang unik: melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar

- d) Memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerah sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya.
- e) Memiliki potensi untuk berkembang.

Adapun kelemahan dari *home industry* yaitu:

- 1) Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.
- 2) Kendala pemasaran produk sebgaiian besar pengusaha industri kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengakseskannya, khususnya dalam informasi pasar.
- 3) Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk industri kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.

Tantangan industri kecil meliputi : iklim usaha yang tidak kondusif, iklim usaha yang kondusif diwujudkan dalam adanya monopoli dalam bidang usaha tertentu.

2.1.3 Pengembangan Kapasitas

2.1.3.1 Pengertian pengembangan kapasitas

Pengembangan kapasitas sampai saat ini cukup beragam didefinisikan oleh para ahli dengan alasan bahwa pengembangan kapasitas menurut Selepole (2018 : hlm 4) merupakan konsep yang sangat universal dan memiliki dimensi beragam. Menurut Morgan (Soeprpto : 2010, hlm 10) dalam Selepole (2018 : hlm 5) pengembangan kapasitas merupakan kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dari waktu-kewatu.

Pendapat di atas sejalan dengan apa yang dikatan oleh Yap (Gandara, 2008 : hlm 9) bahwa *capacity building* dalam Selepole (2018 : hlm 5) merupakan sebuah proses untuk meningkatkan individu, group, organisasi, komunitas dan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu defenisi *capacity building* biasanya dipahami sebagai upaya membantu pemerintah,

masyarakat atau individu-individu dalam pengembangan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat di simpulkan bahwa pengembangan kapasitas (*capacity building*) merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan aparatur (sumber daya manusia) untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari suatu organisasi dalam menjalankan keputusan-keputusan secara efektif melalui peningkatan pemahaman, keterampilan dan kemampuan.

2.1.3.2 Tujuan pengembangan kapasitas

Menurut Selepole (2018 : hlm 7) tujuan pengembangan kapasitas di bagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- 1) Secara umum diidentikan pada perwujudan berkelanjutan suatu sistem;
- 2) Secara khusus ditujukan untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik yang dapat dilihat dari beberapa aspek
- 3) Efisiensi dalam hal waktu dan tenaga (sumber daya) yang dibutuhkan guna mencapai hasil yang diinginkan
- 4) Efektifitas berupa kepastian yang dilakukan demi hasil yang diinginkan
- 5) Responsitas yakni bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tertentu
- 6) Pembelajaran yang berdampak pada kinerja individu kelompok, organisasi dan sistem.

2.1.3.3 Proses pengembangan kapasitas

Proses pengembangan kapasitas berkaitan dengan strategi menata input (masukan) dan proses dalam mencapai *output* dan *outcome* secara optimal, serta menata *feedback* sebagai langkah perbaikan pada tahap berikutnya. Strategi menata masukan berkaitan dengan kemampuan lembaga dalam menyediakan berbagai jenis dan jumlah serta kualitas sumber daya manusia dan non sumber daya manusia sehingga siap untuk digunakan bila diperlukan. Strategi menata proses berhubungan dengan kemampuan organisasi dalam mendesain, memproses dan mengembangkan seperrangkat kebijakan, struktur organisasi dan manajemen. Strategi menata umpan balik berkaitan dengan kemampuan organisasi melakukan

perbaikan secara berkesinambungan melalui evaluasi hasil yang telah di capai, dan mempelajari kelemahan atau kekeurangan yang ada pada masukan, proses, dan melakukan tindakan penyempurnaan secara nyata dengan melakukan berbagai penyesuaian lingkungan yang terjadi. (Haryanto, 2014 : hlm 26).

Menurut Suharto (2017 : hlm 65) indikator keberdayaan yaitu:

- 1) Kekuasaan di dalam: meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah
- 2) Kekuasaan untuk: meningkatkan kemampuan individu untuk berubah; meningkatkan kesempatan untuk memperoleh akses
- 3) Kekuasaan atas: perubahan hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan makro; kekuasaan atau tindakan individu untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut
- 4) Kekuasaan dengan: meningkatkan solidaritas atau tindakan bersama dengan orang lain untuk menghadapi hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan makro.

2.1.3.4 Karakteristik pengembangan kapasitas

Menurut Gandara (2008 : hlm 16) dalam Selepole (2018 : hlm 8) pengembangan kapasitas dapat dicirikan dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Merupakan sebuah proses yang berkelanjutan
- 2) Memiliki esensi sebagai sebuah proses internal
- 3) Dibangun dari potensi yang telah ada
- 4) Memiliki nilai intrinsik tersendiri
- 5) Mengurus masalah perubahan
- 6) Menggunakan pendekatan terintegrasi dan holistik

Ciri-Ciri di atas, dapat dimaknai bahwa peningkatan kapasitas bukan proses yang berangkat dari ketiadaan, melainkan berawal dari membangun sebuah potensi yang sudah ada dan kemudian di proses untuk meningkatkan kualitas baik secara individu, kelompok, organisasi serta sistem agar dapat bertahan di tengah lingkungan yang mengalami perubahan secara terus menerus.

Peningkatan kualitas yang dimaksud bukan hanya ditujukan pada suatu komponen atau bagian dari sebuah sistem saja melainkan diperuntukan bagi seluruh komponen yang bersifat satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau saling terkait antar bagian-bagian yang ada dalam sebuah sistem yang mencakup multi dimensi bersifat dinamis. Konsep dasar dari pengembangan kapasitas ini yaitu pembelajaran, namun penerapannya dapat diukur sesuai dengan tingkat pencapaiannya, apakah diperuntukan dalam jangka waktu yang pendek, menengah atau panjang, dimana proses pada tingkatan yang terkecil berkaitan dengan pembelajaran dalam diri individu, kemudian pada tingkat kelompok, organisasi dan sistem yang juga turut di pengaruhi oleh faktor eksternal yang merupakan lingkungan pembelajaran.

2.1.3.5 Faktor yang mempengaruhi pengembangan kapasitas

Faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan maupun kesuksesan program pembangunan kapasitas (*capacity building*) dalam pemerintah desa. Namun secara khusus, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kapasitas meliputi lima yaitu, komitmen bersama, kepemimpinan, reformasi peraturan, reformasi kelembagaan, dan pengakuan tentang kekurangan dan kelemahan yang dimiliki (Djumandi, 2006 : hlm 154-156 dalam Selepole, 2018 : hlm 14) antara lain :

- 1) Komitmen bersama (*collective commitments*) dari seluruh aktor yang terlibat dalam sebuah organisasi (termasuk pemerintah desa), hal ini sangat menentukan sejauh mana pengembangan kapasitas akan dilaksanakan ataupun di sukseskan. Komitmen bersama ini merupakan modal dasar yang harus terus menerus ditumbuh kembangkan dan dipelihara secara baik karena faktor ini akan menjadi dasar dari seluruh rancangan kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi. Tanpa adanya sebuah komitmen yang baik dari peminpin tingkat atas, menengah maupun bawah dan juga staf yang dimiliki, sangatlah mustahil mengharapkan program pengembangan kapaitas untuk bisa berlangsung apalagi berhasil dengan baik.
- 2) Kepemimpinan (*leadership*). Faktor kepemimpinan merupakan salahsatu hal yang paling mendasar dalam mempengaruhi inisiasi dan kesuksesan program

pengembangan kapasitas. Dalam konteks lingkungan organisasi publik, harus terus menerus di dorong oleh mekanisme kepemimpinan yang dinamis sebagaimana yang dilakukan oleh sektor swasta. Hal ini karena tantangan kedepan yang semakin berat dan realitas keterbatasan sumber daya yang dimiliki sektor publik, selain itu gaya kepemimpinan merupakan salahsatu pendorong sebuah efektifitas suatu kelompok organisasi.

- 3) Reformasi peraturan. Kontekstualitas politik pemerintah desa di indonesia serta aparatur desa yang selalu berlindung pada peraturan yang ada serta faktor formal proseural merupakan hambatan yang paling serius dalam kesuksesan program pengembangan kapasitas. Oleh sebab itu, sebagai sebuah bagian dari implementasi peogram yang sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan maka reformasi pertauran merupakan salahsatu cara yang perlu dilakukan dalam rangka menyukseskan program kapasitas ini,
- 4) Reformasi kelembagaan. Reformasi peraturan di atas tentunya merupakan salah satu bagian yang penting dari reformasi kelembagaan. Reformasi kelembagaan pada intinya menunjuk kepada pengembangan iklim budaya yang kondusif bagi penyelenggaraan program pengembangan kapasitas individu dan kelembagaan menuju pada realitas tujuan yang ingin dicapai. Reformasi kelembagaan menunjuk dua aspek penting yaitu struktural dan kultural. Kedua aspek ini harus dikelola sedemikian rua dan menjadi aspek yang penting dan kondusif dalam menipang program pengembangan kapasitas dalam pemerintahan desa di indonesia.
- 5) Pengakuan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Karena pengembangan kapaitas harus duawali pada identifikasi kapasitas yang dikiliki maka harus ada pengakuan dari personall dan lembaga tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki dari kapasitas yang tersedia. Pengakuan ini tenting karena kejujuran tentang kemampuan yang dimiliki merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki dalam rangka menyukseskan program pengembangan kapasitas.
- 6) pemaparan diatas, dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kapaitas yaitu komitmen bersama, kepemimpinan, reformasi peraturan, reformasi kelembagaan dan pengakuan tentang kekuatam dan

kelemahan yang dimiliki oleh pemerintah desa melalui pengelolaan sistem informasi desa.

2.1.4 Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif merupakan suatu konsep perekonomian di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas, dengan mengedepankan ide ide dan berbagai pengetahuan diri sumberdaya manusia itu sendiri, sebagai faktor produksi yang paling utama. Sopanah dkk (2020 : hlm 2). Menurut *Institute For Development* dalam Ayu (2019 : hlm 143) ekonomi kreatif merupakan suatu proses peningkatan nilai tambah hasil dari eksploitasi kekayaan intelektual berupa aktivitas, keahlian dan bakat individu menjadi suatu produk yang dapat dijual. Kesimpulannya ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep di era ekonomi yang penopang utamanya yaitu informasi dan kreativitas, dimana ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor produksi yang utama dalam kegiatan ekonomi kreatif ini.

2.1.5 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.1.5.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah lembaga yang di bentuk dan didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat (Athsil, 2017).

Badan Usaha milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Ananda, 2020)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Ibrahim dalam Athsil (2017 : hlm 53) merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh suatu desa untuk menghasilkan suatu produksi yang dapat meningkatkan keuangan desa. Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa (PADes). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat

diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah Desa memberikan dukungan dalam merespon pendirian BUMDes.

Tujuan pendirian BUMDes yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa dan dapat mensejahterakan masyarakat.

2.1.5.2 Ciri-ciri Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Departemen Pendidikan Nasional (2007 : hlm 4) ciri-ciri yang membedakan dengan lembaga ekonomi lainnya adalah:

- 1) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama, seluruh masyarakat dapat menjadi pengurus
- 2) Modal usaha atau operasional bersementera dari desa dan masyarakat melalui penyertaan modal (saham dan andil)
- 3) Bidang usaha atau program yang dijalankan disarankan pada potensi-potensi yang ada dan hasil informasi pasar dengan menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom)
- 4) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy)
- 5) Difasilitasi oleh pemerintah, pemProv, pemKab,dan pemDes
- 6) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (PemDes, BPD,Anggota)

2.1.5.3 Tujuan Didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat setempat melalui program atau proyek pemerintah pusat & pemerintah daerah. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes merupakan benar-benar untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumberdaya alam ataupun sumber daya manusianya. Secara spesifik pendirian BUMDes yaitu

untuk menyerap tenaga kerja desa meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah. Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes ini yaitu untuk melayani masyarakat desa dalam pengembangan usaha produktif.

Tujuan lainnya ialah untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat. Secara konseptual pemberdayaan yang usung atau dilaksanakan BUMDes tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep pemberdayaan masyarakat yang sudah banyak dikenal selama ini, misalkan sebagai upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan, untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat prasejahterandengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan atau mendirikan masyarakat.

2.1.5.4 Langkah-langkah Pelembagaan BUMDes

Langkah-langkah pelembagaan BUMDes Menurut Wijaya (2018 : hlm 144) adalah:

1) Sosialisasi tentang BUMDes

Inisiatif sosialisasi kepada masyarakat desa dapat dilakukan oleh pemerintah desa, BPD, KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) baik secara langsung maupun bekerjasama dengan pendamping desa yang berkedudukan di kecamatan, pendamping teknis yang berkedudukan di kabupaten, dan pendamping pihak ketiga (LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan atau Perusahaan).

Langkah sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat desa dan kelembagaan desa memahami tentang apa BUMDes, tujuan pendirian BUMDes, manfaat pendirian BUMDes dan lain-lain. Keseluruhan para pendamping maupun KPMD melakukan upaya inovatif-progresif dalam meyakinkan masyarakat bahwa BUMDes akan memberikan manfaat kepada desa. Subtansi kegiatan ini menjadi rekomendasi pada pelaksanaan musyawarah desa yang mengagendakan pendirian dan pembentukan BUMDes.

2) Pelaksanaan Musyawarah Desa

Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Secara praktikal, musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Musyawarah desa ini membahas mengenai hal-hal sebagai berikut:

Potensi desa yang dapat dikembangkan melalui pengelolaan usaha/bisnis. Mengali kebutuhan sebgayaan besar awarga desa dan masyarakat luar desa. Menentukan rancangan alternatif tentang unit usaha dan klasifikasi jenis usaha. Unit usaha yang diajukan dapat berbadan hukum (PT dan LKM) maupun tidak berbadan hukum, klasifikasi jenis usaha, menyusun kepengurusan, modal usaha BUMDes, rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pokok bahasan operasional.

3) Penetapan perdes tentang pendirian BUMDes

Susunan nama pengurus yang telah dipilih dalam musdes, dijadikan dasar oleh kepala desa dan penyusunan surat keputusan kepala desa tentang susunan kepengurusan BUMDes

2.1.5.5 Prinsip Pengelolaan BUMDes

Enam prinsip dalam pengelolaan BUMDes menurut Wijaya (2018 : hlm 136) yaitu:

- 1) Kooperatif. Semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus melaksanakan kerjasama yang baik demi pengembangan dan berlangsung hidup usahanya.
- 2) Partisipatif. Semua komponen BUMDes harus sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang bisa mendorong kemajuan BUMDes.
- 3) Emansipatif. Semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan
- 4) Transparan. Aktivitas yang berpengaruh dan bersinggungan langsung dengan masyarakat harus diketahui oleh segenap lapisan masyarakat

- 5) Akuntabel. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif
- 6) Berkelanjutan seluruh kegiatan harus dapat dikembangkan serta dilestarikan oleh seluruh masyarakat.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

1. M. Atshil Maulana, 2017. Pengembangan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.

Tujuan penelitian ini yaitu : (1) untuk mengetahui proses pengembangan ekonomi melalui BUMDes di Desa Hanura Teluk Pandan Pesawaran. (2) Untuk mengetahui partisipasi masyarakat Desa Hanura Teluk Pandan Pesawaran dalam proses pelaksanaan pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam proses pengelolaan BUMDes dalam upaya mengembangkan ekonomi masyarakat dilakukan melalui di buka beberapa unit usaha yang juga menurupakan sebuah kebutuhan mutlak masyarakat, yaitu pengelolaan unit usaha produktif rumah tangga dan unit jasa lainnya. Dengan adanya BUMDes diharapkan mampu menjadi strategi yang efektif dalam memobilisasi potensi yang dimiliki desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya BUMDes menjadi upaya untuk mengalokasikan dana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu dalam peningkatan kapasitas home industry perlu ada yang namanya kerjasama satu dengan yang lainnya. BUMDes merupakan suatu wadah untuk membantu masyarakatnya. Hadirnya BUMDes sebagai supporting/fasilitator artinya BUMDes membantu kegiatan yang dilakukan oleh home industri terkhusus dalam hal pemasaran. Dengan adanya BUMDes diharapkan mampu meningkatkan produksi home industry dan pastinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada.

2. Adhi Nugroho, 2016. Strategi Pengembangan Kewirausahaan Masyarakat Melalui Home Industri Criping Pisang Desa Banjarwaru Kecamatan Bawang Kabupaten Batang. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negri Malang.

Tujuan penelitian ini yaitu : (1) Mengetahui gambaran strategi pengembangan home industri criping pisang sebagai kewirausahaan masyarakat di Desa Banjarwaru Kecamatan Bawang Kabupaten Batang. (2) Menganalisis faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan home industri criping pisang melalui kewirausahaan masyarakat di Desa Banjarwaru Kecamatan Bawang Kabupaten Batang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Home Industry Negri Ciki merupakan usaha rumah tangga yang memproduksi criping pisang dengan aneka rasa, home industry ini beroperasi di Desa Banjarwaru Kecamatan bawang Kabupaten Batang, home industry ini tidak melakukan pengembangan strategi dengan memandang prinsip Distinctive Competence. Prinsip ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat melakukan kegiatan lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya.

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu bahwa home industry yang ada di Desa Pasirtamiang merupakan usaha rumah tangga yang mengolah berbagai macam olahan seperti kerupuk, opak, aci, keripik kaca dan bolu jadul. Produk tersebut nantinya akan di jual di BUMDes.

3. Helen Malinda, 2017. Analisis Strategi Pengembangan Bisnis UKM Guna Meningkatkan Pendapatan Karyawan Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Fakultas Ekoonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Tujuan Penelitian ini yaitu : (1) Untuk mengetahui proses produksi pada home industry dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Mengkirau. (2). Untuk mengetahui peran home industry dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Mengkirau. (3). Untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap peran home industry yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Mengkirau.

Hasil penelitian ini yaitu Proses produksi yang dilakukan oleh pengusaha home industry di desa Mengkirau dalam melakukan pengolahan masih sangat sederhana atau masih menggunakan sistem manual, dari segi permodalan masih minim sehingga sulit bagi mereka untuk mengembangkan usahanya, sementara dari pengadaan bahan baku juga masih terbatas.

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu home industry desa pasirtamiang proses produksi yang dilakukan bisa dikatakan masih sederhana karena hanya menggunakan alat yang ada.

4. Siti Susana, 2012. Penerapan Home Industri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Mengkirau Kecamatan Merbau).

Tujuan penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui serta menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal saat ini dari usaha pengrajin genteng di Desa Jatirenggo. (2) Untuk mengkaji pandangan ekonomi islam terhadap strategi pengembangan pengrajin genteng dalam meningkatkan pendapatan keluarga Desa Jatirenggo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. (3) Untuk mengetahui SWOT dalam perspektif ekonomi islam usaha pengrajin genteng di Desa Jatirenggo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil penelitian bahwa strategi yang dilakukan ini membuahkan hasil yaitu keberhasilan pengrajin genteng dalam mempertahankan daya saingnya terhadap pesaing-pesaingnya dimana usaha genteng ini masih berjalan dan masih banyak konsumen yang menggunakan dan memanfaatkan genteng dilihat dari hasil produksi.

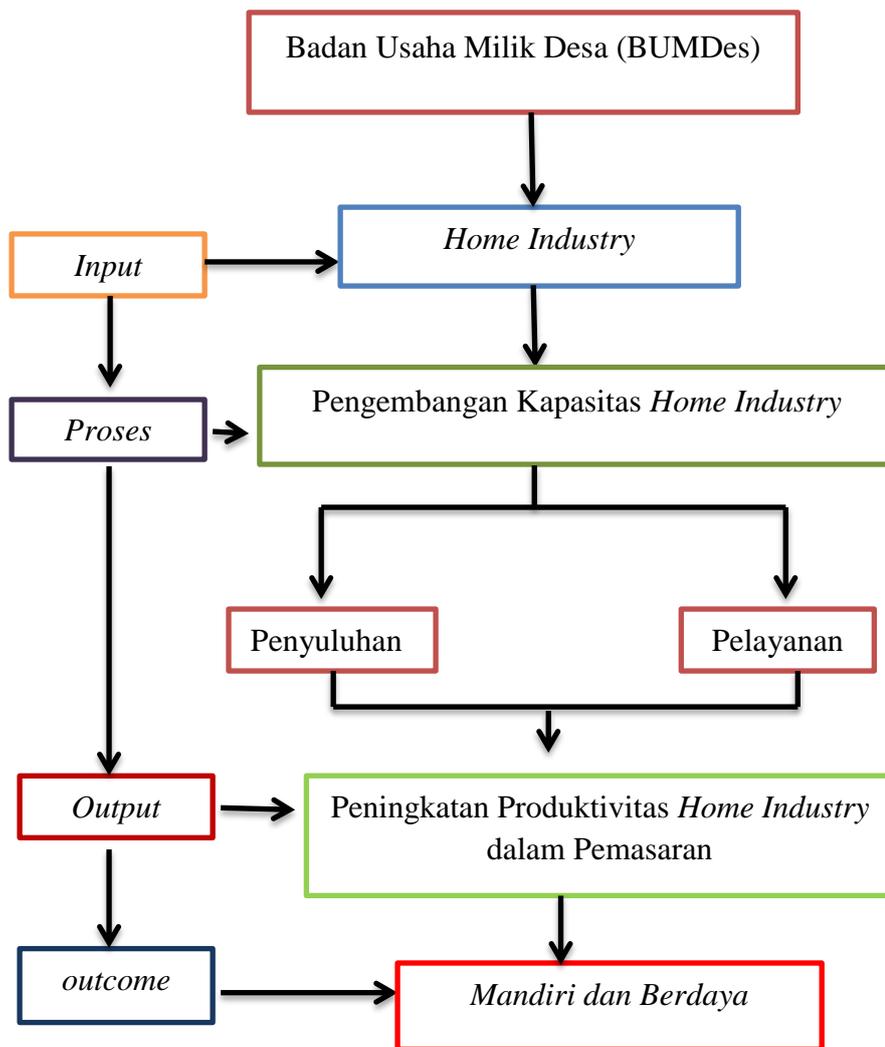
5. Hasri Puspita Rini, 2011. Strategi Pengembangan Industri Kecil Carica Untuk Meningkatkan Pendapatan Pengrajin Di Kabupaten Wonosobo. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret.

Tujuan penelitian yaitu : (1) Untuk mengetahui penerapan strategi pengembangan industri kecil Carica Kabupaten Wonosobo tahun 2010. (2) Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi industri kecil Carica dalam meningkatkan pengembangan industri Kabupaten Wonosobo tahun 2010. (3)

Untuk mengetahui pengaruh strategi pengembangan industri kecil Carica terhadap pendapatan pengrajin industri carica di Kabupaten Wonosobo tahun 2010.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dengan melakukan strategi pengembangan pada sentra industri kecil Carica, dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan dan pendapatan para pengrajin Carica di Kabupaten Wonosobo. Faktor-faktor yang dapat dikembangkan antara lain yaitu modal, teknologi, manajemen, pasar, kelembagaan, kewirausahaan dan kemitraan usaha. (2) Kendala-kendala yang dialami oleh sentra industri kecil Carica sama halnya dengan industri kecil pada umumnya, antara lain kekurangan modal, penggunaan teknologi sederhana, proses manajemen yang kurang teratur, dan masalah bahan baku. (3) Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pengrajin antara lain yaitu dengan memanfaatkan kombinasi dari kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan ancaman (threats), yaitu kombinasi kekuatan dengan peluang, kekuatan dengan ancaman, kelemahan dengan peluang dan kelemahan dengan ancaman.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar. 2.1 Kerangka Konseptual

Sumber : Peneliti (2021)

Pembangunan secara alternatif dapat diwujudkan dengan memberikan otonomi kepada masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, seperti pemberdayaan *home industry* melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pasirtamiang.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengadakan penyuluhan packaging dan penyuluhan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Penyuluhan ini di anggarkan 1 tahun sekali. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memberikan pelayanan transportasi untuk pemasaran produk *home industry*, penyediaan produk bahan pokok untuk *home industry* dan gudang serbaguna. Selain itu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga memiliki akses info untuk mengikuti acara seperti pameran baik dalam lingkup kabupaten maupun lingkup provinsi, akan tetapi untuk mengikuti pameran tingkat provinsi ada ketentuan tersendiri dan tidak sembarang bisa mengikutinya, yang boleh mengikuti pameran tersebut yaitu *home industry* yang memiliki Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yaitu merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh bupati/walikota terhadap pangan produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan, dalam rangka peredaran pangan.

Kemudian Produk *home industry* dari program ekonomi kreatif Desa Pasirtamiang yaitu bermacam-macam jenisnya diantaranya yaitu ada kerupuk, opak aci, keripik kaca dan bolu jadul. Akan tetapi pemasaran dari produk tersebut belum optimal dan belum menjangkau wilayah antar kota.

Hadirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa pasirtamiang ini, yaitu merupakan suatu wadah/*supporting*/fasilitator untuk dapat mengembangkan usaha *home industry* terkhusus dari segi pemasarannya. Dengan adanya kegiatan *home industry* ini diharapkan terjadinya perubahan yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa pasirtamiang dan khususnya terhadap kaspaitas *home industry* Desa Pasirtamian

2.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah di kemukakan diatas dapat diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengembangkan kapasitas *home industry* di Desa Pasirtamiang Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis?
- 2) Kapasitas *home industry* apa saja yang meningkat melalui program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pasirtamiang Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis?